



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli sampai 30 September 2024

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS 4,00 / 99,98 %

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| Jumlah | 109 Responden | | | | |
| Jenis Kelamin | Laki - laki : 97 | Perempuan: 12 | | | |
| Pendidikan | Tidak / Belum Sekolah : 0 | SD : 0 | SMP : 0 | SMU : 28 | S3 : 0 |
| | | Diploma : 6 | S1 : 65 | S2 : 10 | |
| Pekerjaan | | SWASTA : 29 | WIRUSAHA : 23 | TENAGA KONTRAK : 6 | |
| | | PNS : 13 | TNI : 0 | POLRI : 7 | |
| | | LAINNYA : 31 | | | |

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- 1 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 435
- 2 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 436
- 3 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? 436

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

Berdasarkan hasil survei dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 (tiga) fokus perbaikan/tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survei sebagai berikut :

1. Untuk memperbaiki Indikator Transaksi Pembayaran, direkomendasikan:
 - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha sekarang sudah tidak menggunakan biaya radius yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan melainkan yang digunakan aplikasi sehingga biaya radius dapat diminimalisir;
 - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan bahwa biaya yang dibayar oleh Pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Raha adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan biaya tersebut tidak masuk ke kas perorangan atau pengadilan;
2. Untuk memperbaiki Indikator Manipulasi Peraturan, direkomendasikan:
 - Petugas PTSP maupun petugas informasi selalu memberitahukan proses atau aturan yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Negeri.
3. Untuk memperbaiki Indikator Penyalahgunaan Jabatan, direkomendasikan:
 - Ketua Pengadilan menegaskan bawah tidak ada dan dilarang adanya praktek "Orang Dalam" di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara. Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Raha, 1 Oktober 2024

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha



Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 197601032002121004